

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

C.S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Jala Permata, 2009).

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jilid I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992).

Harlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia : Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Hendrastanto Yudowidagdo, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009).

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010).

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2006).

Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1986).

Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Peninjauan Kembali Perkara Pidana.

JURNAL DAN SKRIPSI

Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik*, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011).

Arfan Faiz Muhlizi, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Yang Berkeadilan dan Berkepastian Hukum*, Jurnal, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015).

Danny Dzul Hidayat, *Prosedur Penangkapan Tersangka Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-XI/2013)*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2017).

Fajar Laksono Soeroso, *Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi, 2014).

Melisa Situmeang, *Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali Lenih Dari Sekali Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Terhadap Hak Terpidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana*, Jurnal, (Pekanbaru: Fakultas Hukum, 2016).

Ricko Anugrah Setiawan, *Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Mengenai Pembubaran BP Migas Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2013).

Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014).

Zaskia Allika Devi Ariastyanyo Putri, *Kajian Yuridis Upaya Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Terhadap Asas Litis Finri Oportet Dalam Perkara Pidana*, Jurnal, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).